

Menggagas Peran Optimal CSR dalam Pembangunan



Judul	Corporate Social Responsibility and International Development Is Business the Solution?
Penulis	Michael Hopkins
Penerbit	Earthscan, 2007
Halaman	xvi+243

Jalal
Aktivis Lingkar Studi CSR
www.csrindonesia.com

“...clearly that MNEs are very much involved in development. Over time, they will be more involved in development than ever before and in ways that are hard to imagine today.”

Michael Hopkins

PBB sangat sadar bahwa berbagai masalah pembangunan yang ada sejak berberapa dekade lalu telah gagal diselesaikan oleh negara secara sendirian. Karenanya, secara sadar PBB mengundang berbagai organisasi masyarakat sipil untuk bergabung ke dalam proses-proses pengambilan keputusan dan program-program kerjanya di lapangan. Belakangan, PBB juga mengundang dunia usaha—khususnya perusahaan-perusahaan multinasional—untuk bergabung di dalam gerbong pembangunan yang ditariknya. Dengan demikian, sebetulnya PBB tidak lagi menjadi sebuah perkumpulan pemerintahan semata, melainkan perkumpulan aktor-aktor pembangunan. Sejarah ini dicatat oleh Jem Bendell dalam *Flags of Inconvenience? The Global Compact and the Future of United Nations* (ICCSR Research Paper Series No. 22-2004).

UN Global Compact memang merupakan “undangan resmi” bagi dunia usaha untuk masuk berperan menentukan arah pembangunan internasional. Namun, sebelum undangan itu dilayangkan, sebetulnya peran perusahaan sudahlah tampak sangat jelas—bahkan menonjol dibandingkan aktor-aktor yang lain. Masalahnya, peran dalam pembangunan itu kerap dianggap negatif. Berbagai penjurur dunia telah menyaksikan betapa banyak perusahaan abai terhadap dampak-dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh operasi mereka. Hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya di manapun sering ditandai dengan hubungan yang adversarial, saling bertentangan, karena perhatian yang minim dari perusahaan atas dampak-dampaknya. Masyarakat, terutama yang tinggal dekat dengan operasi perusahaan, kerap hanya mendapatkan remah-remah ekonomi saja dari perusahaan, sementara mereka harus menanggung rusaknya tatanan sosial dan lingkungan yang kerap bersifat tak terbalikkan.

Masuknya konsep CSR ke dalam wacana dan praktik perusahaan tampaknya membawa berkah perubahan. Tak dapat disangkal lagi, ada kekuatan besar yang mengubah perilaku banyak perusahaan di hadapan para pemangku kepentingannya. Tekanan yang diberikan oleh para aktivis telah membuat perusahaan-perusahaan mengubah strategi bisnisnya dari *single bottom line* pencarian keuntungan menuju *triple bottom line* keseimbangan ranah ekonomi-sosial-lingkungan. Tentu saja hal ini patut disyukuri, namun juga harus tetap dikawal dengan ketat. Bagaimanapun kecenderungan banyak perusahaan untuk mengedepankan keuntungan ekonomi bagi dirinya dibandingkan keadilan sosial dan lingkungan tetaplah besar. Melihat hal

ini, banyak akademisi yang kemudian mengingatkan bahwa skeptisisme yang sehat terhadap perilaku perusahaan—khususnya berkaitan dengan peran mereka dalam pembangunan—haruslah tetap dijaga. Jurnal *Development* Vol. 47/3, 2004 memuat tulisan Wendy Harcourt *Is CSR Rewriting Development?*; tulisan Tom Fox *Corporate Social Responsibility and Development: In Quest of an Agenda*; dan tulisan Michael Blowfield *CSR and Development: Is Business Appropriating Global Justice?* Selain itu, peringatan yang sama juga diberikan oleh Bryane Michael dalam *Corporate Social Responsibility in International Development: An Overview and Critique* (*Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, Vol 10, 2003).

Kalau berbagai tulisan di atas utamanya bersifat peringatan dan kritik atas CSR yang kerap digunakan sebagai “wajah ramah” perusahaan—namun ada bahaya besar bahwa perusahaan sebetulnya tidak juga mampu dan mau melakukan transformasi ke arah pembangunan yang lebih adil—buku Michael Hopkins yang sedang dibahas ini berangkat dari peringatan dan kritik itu menuju resep bagi CSR yang memang secara optimal mampu menghadirkan keadilan. Hopkins adalah pengarang buku terkenal *The Planetary Bargain*—yang kini kerap dipergunakan sebagai frasa standar di kalangan pemerhati CSR—di tahun 2003. Ia adalah juga profesor dalam bidang riset korporasi dan sosial di Universitas Middlesex, Inggris, selain CEO dari konsultan CSR terkenal MHC International, Ltd. Dengan segudang pengalaman dan banyak karya seputar CSR, tidaklah salah kalau pembaca akan berharap banyak pada buku ini. Tidak kurang dari nama-nama terkenal Emilio Klein, Hernando de Soto, Adrian Payne dan Gerry Rodgers memberikan tanggapan sangat positif di sampul belakang buku. Emilio Klein menyatakan “*It is clearly written, with plenty of wit and humour*”, sementara Adrian Payne memuji buku ini sebagai “*very readable, well referenced and thought provoking*”. Lembar demi lembar buku ini memang akan membuktikan kepada pembacanya bahwa pujian-pujian itu tidak berlebihan.

Ada 12 bab yang dipergunakan untuk menyusun argumennya bahwa CSR-lah yang kelak akan berkontribusi besar bagi pembangunan. Walaupun argumen ini tampak sangat optimis, namun semuanya disusun dengan sangat hati-hati. Hopkins tidak menutup-nutupi banyaknya kegagalan yang sudah terjadi dalam inisiatif CSR—dibahas dalam bab 3—namun juga menyeimbangkannya dengan berbagai kesuksesan yang telah dicatat CSR. Dengan menyeimbangkan cerita gagal-sukses dari CSR, Hopkins bisa memberikan kepada pembacanya pelajaran-pelajaran yang sangat penting mengenai apa saja yang harus dikerjakan dan apa yang harus dihindari. Daftar semacam ini terutama berguna untuk pembaca yang merupakan praktisi CSR di perusahaan-perusahaan. Hal ini membedakan Hopkins dengan penulis akademisi lainnya. Biasanya, para akademisi menuliskan hal-hal yang reflektif namun dalam tataran yang tinggi, sehingga kurang bermanfaat bagi mereka yang berorientasi praktis. Hopkins sangat lihai menuliskan bab-babnya, sehingga bisa berguna untuk mereka yang berorientasi akademik maupun praktis.

Bab Pertama ia pergunakan untuk menggambarkan betapa perusahaan adalah aktor pembangunan yang sangat kuat dibandingkan aktor yang lainnya. Ukuran kapitalisasinya yang luar biasa besar dan kehendak untuk terus menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang menyebabkan perusahaan haruslah terlibat dalam pembangunan yang menjamin itu semua, yaitu bentuk pembangunan yang berkelanjutan. Melihat nilai kapitalisasi, dunia kiranya memang sulit untuk kelewat berharap pada PBB. Anggaran PBB hanyalah USD 55 milyar per tahun, yang hanya setara dengan 20% kapitalisasi General Electric (hal. 7). Padahal, General Electric hanya nongkrong di urutan kesembilan perusahaan raksasa di tahun 2005 (hal. 3).

Sayangnya, menurut Hopkins, kebanyakan perusahaan belumlah menyadari bahwa hanya apabila pembangunan berlanjut maka bisnis mereka bisa berlanjut pula, atau *sustainable development*-lah yang menjamin *sustainable enterprises*. Kebanyakan perusahaan masih berkatat pada bentuk-bentuk filantropi atau *charitable giving* semata. “*Development projects are much more complicated than charitable donations,....Development means working with local partners as well as the public institutions to create sustainable projects....the best development projects are those which people to help themselves...*” (hal. 7-8) adalah pendirian Hopkins yang paling penting. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan bukanlah yang ahli dalam hal pembangunan—seperti juga PBB dan pemerintah yang juga telah terbukti tidak berdaya menghadapi tumpukan masalah sosial dari waktu ke waktu—namun karena memang hanya apabila pembangunan berlanjut maka perusahaan bisa terus berbisnis, maka perusahaan harus melibatkan diri dalam pembangunan. Tentu saja, perusahaan telah banyak berkontribusi dalam pembangunan, khususnya dalam aspek ekonomi, namun tak bisa dimungkiri moda pembangunan yang mereka anut bukanlah moda yang berkelanjutan, karena kebanyakan masih

mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. CSR, yang menganut keseimbangan ekonomi-sosial-lingkungan menjadi cara berpikir yang berbeda dengan apa yang dilakukan kebanyakan perusahaan hingga sekarang.

Kritik Hopkins terhadap kecenderungan filantropis dari kebanyakan inisiatif CSR perusahaan dinyatakannya pada Bab Kelima. Dengan judul bab yang provokatif *Corporations Should Abandon Philanthropy and Concentrate on CSR*, ia memberi peringatan bahwa filantropi yang tidak bertujuan pembangunan berkelanjutan haruslah segera ditinggalkan. Ia membuka babnya dengan menyatakan bahwa Michael Porter yang menyamakan CSR dengan filantropi adalah salah. Dan, kalau kesalahan itu dilakukan oleh seorang guru manajemen ternama, maka tak mengherankan apabila para akademisi, pimpinan bisnis dan politisi juga kemudian ikut-ikutan menyamakannya. Pendirian Hopkins mengenai CSR—seperti yang dikemukakannya dalam *The Planetary Bargain* dan Bab Pertama dan Kedua buku ini—didasarkan pada teori sistem dan teori pemangku kepentingan. Menurutnya, “*CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in a socially responsible manner. Stakeholder exist both within a firm and outside. The aim of social responsibility is to create higher and higher standards of living, while preserving the profitability of the corporation...*” (hal. 9), sementara filantropi adalah “*the practice of performing charitable or benevolent actions*” (hal. 114). Tentu saja, filantropi hanya menjadi bagian saja dari CSR, dan bukan istilah yang bisa saling dipertukarkan. Apalagi, CSR haruslah bersifat *before profit* dan berkelanjutan, sementara kebanyakan filantropi diperhitungkan belakangan dari keuntungan perusahaan, dan tidak secara sungguh-sungguh ditujukan sebagai upaya yang berkelanjutan. Karenanya, filantropi hanya dapat dipertahankan manakala ia sungguh-sungguh menjadi bagian dari kerangka CSR dan pembangunan berkelanjutan (hal. 116).

Selain melancarkan kritik kepada praktik-praktik sosial perusahaan yang kurang tepat, secara gamblang Hopkins juga membalas seluruh kritik terhadap CSR pada Bab Keenam (hal 118-129). Menurutnya, kritik-kritik pedas terhadap CSR memang jauh lebih mudah dilontarkan, sementara proposal perbaikannya lebih sulit untuk diungkapkan. Ini membuat banyak sekali kritik terlontar, termasuk dari dunia akademis, namun jawabannya lebih sedikit terdengar. Ada tujuh kritik terhadap CSR yang menurut Hopkins paling banyak dilontarkan, yaitu bahwa CSR tidak memiliki definisi yang universal, CSR hanyalah bagian dari kehumasan, CSR hanyalah aktivitas filantropi yang tidak berhubungan dengan profitabilitas perusahaan, CSR kerap menjadikan perusahaan melupakan tujuan utamanya, CSR sebetulnya adalah jalan masuk dari belakang bagi sosialisme, tanggung jawab dari bisnis hanyalah membuat keuntungan dan karenanya tak perlu ada CSR, serta CSR tak akan berarti banyak karena perusahaan tidak bisa dipercaya untuk mengatur dirinya sendiri. Jawaban lugas atas ketujuh kritik tersebut benar-benar disediakan oleh Hopkins, sehingga pembacanya yakin bahwa CSR memang adalah salah satu alat yang layak dipergunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Yang mungkin agak disayangkan adalah Hopkins tidak mengambil manfaat dari penulis-penulis pro-CSR lainnya. Hampir seluruh kritik dijawab dengan logikanya yang memang kuat. Padahal, pembaca akan bisa menarik manfaat yang besar kalau misalnya pembelaan dari penulis lainnya juga disajikan. Misalnya, kritik yang menyatakan bahwa tak ada hubungan antara CSR dengan profitabilitas dapat dengan mudah disangkal lewat penelitian komprehensif Marc Orlitzky, Frank Schmidt dan Sara Rynes berjudul *Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis* (Organization Studies, Vol 24/3 2003), atau belakangan oleh Christine Arena lewat *The High Purpose Company* (HarperCollins, 2007) dan Raj Sisodia, Jagdish Sheth, dan Dan Wolfe dalam *Firms of Endearment* (Wharton School Publishing, 2007). Karya-karya tersebut secara bernas, dengan metodologi yang berbeda-beda, telah menunjukkan bukti tak tersangkal tentang hubungan antara kinerja CSR dengan kinerja finansial perusahaan. Mungkin ketika buku ini ditulis, karya Arena maupun Sisodia, dkk. belum muncul di pasaran, namun ada banyak juga tulisan lain yang bisa dikutip. Kalau Hopkins memanfaatkannya, maka pembaca bisa lebih diperkaya lagi sumber pengetahuannya.

Setelah menunjukkan potensi CSR dalam pembangunan dan menjawab berbagai kritik atas CSR, Hopkins kemudian berkonsentrasi untuk menjelaskan proposalnya agar CSR benar-benar menjadi alat yang handal dalam menggapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Ia menjelaskan kaitan antara CSR dengan upaya pengurangan kemiskinan (Bab Ketujuh), dengan rantai produksi (Bab Kedelapan), pembangunan di negara-negara berkembang (Bab Kesembilan), keterbatasan lembaga-lembaga internasional (Bab Kesepuluh), investasi yang ramah sosial di negara-negara berkembang (Bab Kesebelas), serta tindakan

yang harus diambil oleh perusahaan agar kontribusinya nyata dalam pembangunan (Bab Keduabelas). Keseluruhan bab itu disajikan dalam energi yang berimbang. Hopkins tak pernah tampak kelelahan mengajukan proposal. Ketika ia mengajukan proposal, ia sama kuatnya ketika melontarkan atau menjawab kritik.

Untuk meringkaskan proposalnya, ia menulis di hal. 235 apa saja yang harus dilakukan perusahaan secara internal maupun eksternal. Ke dalam perusahaan, harus ada (1) upaya-upaya untuk mendefinisikan strategi CSR perusahaan dalam kaitannya dengan pembangunan secara keseluruhan, (2) kepastian bahwa upah yang dibayarkan di dalam perusahaan dan rantai pemasoknya telah mampu menghidupi pekerjanya dengan wajar, (3) kerjasama dengan pekerja untuk selalu meningkatkan kinerja lingkungan dan keamanan kerja, serta (4) pemantauan regular atas praktik antikorupsi di perusahaan. Ke luar, perusahaan, punya lebih banyak agenda lagi, yaitu (5) kerjasama dengan pemerintah negara setempat dalam meningkatkan efisiensi dan keefektifan program-program penurunan angka kemiskinan, (6) pemberian pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas publik, (7) kerjasama yang aktif dengan perusahaan lain dan organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan dan meningkatkan kinerja UKM, (8) keterlibatan dalam meningkatkan nilai-nilai dan keterampilan wirausaha, (9) investasi dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan negara di mana perusahaan beroperasi, serta (10) kepastian bahwa inisiatif-inisiatif CSR memang berkelanjutan dan ditujukan bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Buku ini seakan-akan merupakan penjabaran yang hampir sempurna dari kata-kata terkenal Bjorn Stigson, Direktur WBCSD, bahwa perusahaan tidak dapat sukses pada masyarakat yang gagal. Untuk itu, investasi harus dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa masyarakat tempat perusahaan berada haruslah menjadi masyarakat yang lebih makmur, yang berhasil membangun dirinya dalam jangka panjang. Tentu saja, lawan yang “paling tangguh” dari kepentingan memastikan itu adalah cara berpikir jangka pendek dari perusahaan. Apalagi, bagi perusahaan yang memang merencanakan untuk berada dalam waktu yang tidak terlalu lama berada di suatu tempat. Namun kiranya Hopkins telah menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan dalam jangka panjang—di manapun ia beroperasi—akan sangat tergantung dari reputasi yang telah dibangunnya. Dengan kesulitan-kesulitan pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan, maka reputasi perusahaan akan sangat ditentukan dari apakah ia dipersepsi telah menjadi bagian dari permasalahan atau bagian dari pemecahannya.

Bagi Hopkins, perusahaan multinasional yang sangat penting untuk dibujuk dan dibimbing untuk menjadi aktor pembangunan yang mumpuni. Sementara, pemerintah dan perusahaan di negara berkembang serta organisasi nonpemerintah jelas dipandang sebagai pihak yang perlu dibantu, atau paling banter diajak bekerjasama dalam skema kemitraan. Sesungguhnya ada risiko dalam cara berpikir yang demikian. Perusahaan multinasional, bagaimanapun, memiliki sejarah yang bercampur antara peran sebagai “dewa penolong” maupun “setan besar”. Mereka memang kerap berperan besar dalam pembangunan, namun tak jarang juga menjadi sumber utama masalah.

Proposal Hopkins masih tampak kelewat bergantung pada *business case* dan kehendak perusahaan multinasional untuk berbuat kebaikan demi keberlanjutan usahanya alias *enlightened self interest*, atau paling jauh *enlightened common interest*. Bisakah proposal itu berhasil? Mungkin saja. Namun, jauh lebih aman bagi negara-negara berkembang untuk memastikan itu melalui ikatan yang lebih kuat, misalnya melalui kontrak-kontrak karya yang secara lugas menyertakan peran perusahaan dalam pembangunan. Di sini, harus ditegaskan bahwa peran tersebut haruslah berkaitan dengan wilayah dampak operasi perusahaan itu, sesuai dengan “hukum besi CSR”. Sebab, apabila tidak, maka perusahaan akan dijejaki melakukan apa yang sebetulnya adalah tanggung jawab pemerintah. Kontrak yang jelas selain mencantumkan batasan tanggung jawab haruslah juga melindungi perusahaan, masyarakat dan pemerintah dari beban yang tidak seharusnya mereka tanggung.

Menempatkan mereka yang di negara berkembang semata-mata sebagai objek yang ditolong atau mitra kerja sejajar mungkin juga agak menyakitkan. Banyak pihak yang berpendirian bahwa sebagian besar perusahaan multinasional belumlah cukup handal sebagai aktor pembangunan—sebagaimana yang juga diakui oleh Hopkins. Sementara, pemerintah, perusahaan dan organisasi nonpemerintah di negara

berkembang sangat mungkin memiliki kapasitas yang jauh lebih baik dalam hal ini dibandingkan perusahaan multinasional. Akan sangat baik bagi Hopkins apabila mengakui juga keharusan perusahaan multinasional untuk belajar dari aktor-aktor pembangunan yang terlebih dahulu bekerja di negara-negara berkembang ini. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesan bahwa buku Hopkins adalah manifesto *whitemen's burden*—tanggung jawab bangsa-bangsa Barat (*the West*) untuk mengajari mereka yang lebih terbelakang (*the Rest*)—jilid kedua. Bukankah jilid pertamanya sudah terbukti salah? Lagipula, polarisasi *the West and the Rest* bisa pula dibalik menjadi *the East and the Beast*. CSR tentu tidak menganut polarisasi yang menyesatkan itu, sehingga keharusan saling belajar memang penting untuk ditekankan.